

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

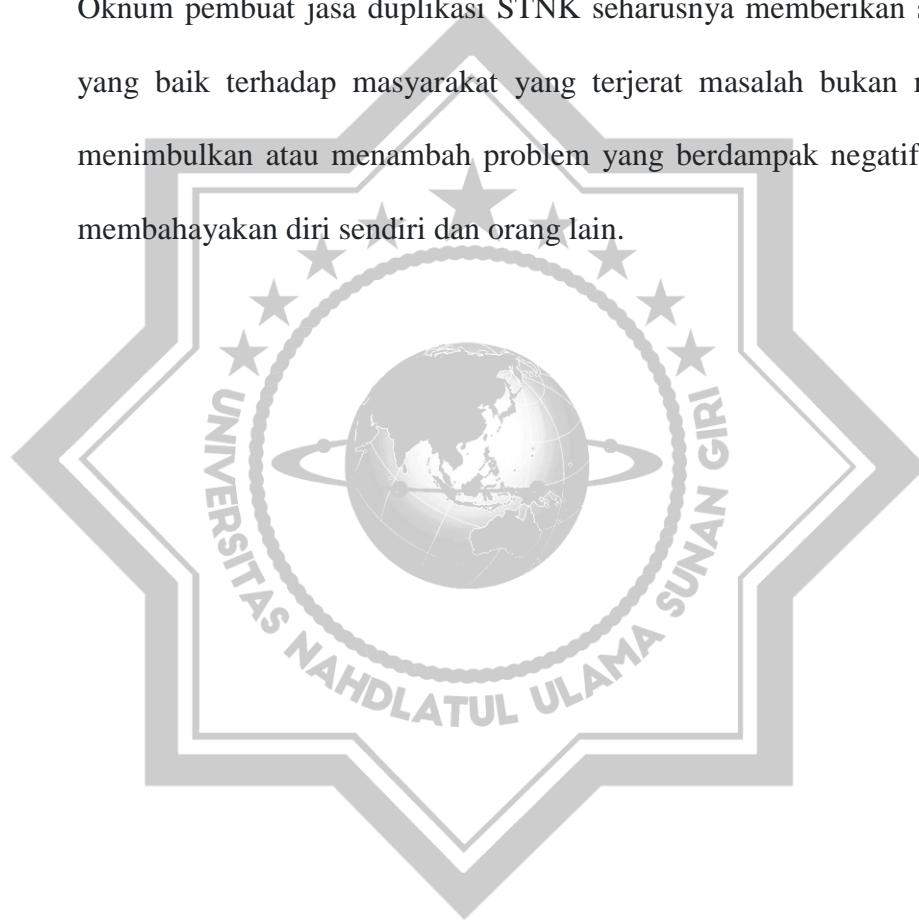
Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan pada praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Mekanisme Praktik pemalsuan STNK; Oknum pengguna jasa duplikat menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan duplikat untuk mobil miliknya dengan cara memesan kepada pembuat STNK duplikat dengan tujuan agar mobil yang dimilikinya bisa digunakan sehari-hari.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik yang dilakukan tersebut merubah arsip negara di mana surat yang digunakan bukan asli milik pengguna jasa duplikat dan perbuatan tersebut melanggar hukum Islam, di mana orang islam wajib membayarkan pajak dari sebagian hartanya selain zakat. Sedangkat praktik ini juga merupakan perbuatan tercela dan bisa dikenakan hukuman atau *ta'zīr*.

#### B. SARAN

Dalam praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya kepolisian lalu lintas lebih teliti dalam melakukan razia saat mengecek STNK, nomor plat dan jenis kendaraan tersebut.
2. Pengguna jasa duplikasi STNK Seharusnya sadar bahwa hal tersebut tidak patut dilakukan karena dapat menimbulkan *kemudharatan*. Oknum pembuat jasa duplikasi STNK seharusnya memberikan solusi yang baik terhadap masyarakat yang terjerat masalah bukan malah menimbulkan atau menambah problem yang berdampak negatif serta membahayakan diri sendiri dan orang lain.



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Arief Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Ar-Ruhaly. A. Ruway'i. *Fikih Umar 2*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsan, 1994.
- Al-Jazairi Abu Bakar Jabir. *Kumpulan Akhlak Tercela*. Minhajul Muslim. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azhar Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Doi A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002.
- Djazuli Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2000.
- Fachmi. *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia Publishing, 2011.
- Fathoni Abdurrohmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hanafi Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam cet 6*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hafiduddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Irfan Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Mubarak Jail. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muslich. *Hukum Pidana Islam*.
- Muslich Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasir Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

- Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial Cet ke-6*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho Muhammad Awal Satrio. *Hak dan kewajiban dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Nuh Muhammad. Suhartono Winot. *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*. Cet. I. Malang: UB Press, 2017.
- Qardhawi Yusuf. *Fiqhuz Zakah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Rahman Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah 10*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soemitro Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 1998.
- Sukmadinata Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Suharsimi Arikunta. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Wisnubroto. AL. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Widyamanti Wirastuti. Dini Natalia. *Geografi*. t.t.: Grasindo, 2006.
- Yahya Abi Zakariya. *Riyadhus shalihin*. Al-Hidayah.

### **Peraturan dan Undang-undang**

#### **KUHP. Pasal 263. Pemalsuan Dokumen.**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tentang Tugas Kepoisian Negara Republik Indonesia Pasal 30 Ayat 4. Diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8-17.

Undang-undang Republik Indonesia, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 (10) Nomor 28 Tahun 2009.

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### **Jurnal**

Basri Agung Kurniawan. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)". *Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1, No. 1. (Agustus 2017).

Fakhri Haris. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dokumen Kontrak". *Jurnal UM Palembang*. Vol. 4 No. 1 (Maret 2019).

Fauzi Ahmad Sofwan. "Transaksi jual-beli terlarang Ghish atau Tadlis kualitas". *Mizan Journal Of Islamic Law*. Vol. , No. 2, 2017.

Gazali. "Pajak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol: VII, No. 1, (Juni, 2015).

Mas Marwan. "Penguatan Argumentasi FaktaFakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim". *Jurnal Yudisial*. Vol. 5. No. 3. (2012).

Mulyadi. Mahmud. "Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Surat Palsu Dalam Akta Otentik". *USU Law Journal*. Vol.3.No.3 (November 2015).

N Ike Kusmiati. "Kekuatan Pembuktian Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang Dijadikan Alat Bukti". *Jurnal Yudisial*. Vol. IV. No. 1 (April 2011).

Nurkholis. *Pendidikan Dalam Upaya Tindakan Memajukan Teknologi*. Jurnal Kependidikan. Vol. 1 No. 1 Nopember 2011.

Sandia Mohammad. "Prospek Masa Depan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Mashlahah*. Vol. 1. No. 1. (2013).

Surahman Maman. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Universitas Islam Bandung*. Vol. 1, No. 2. (Juli, 2017).

- Suhar Mansur Andi Ahmad. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh Notaris". *Jurnal Karya Ilmiah*. (5 Februari 2013).
- Tilopa Martina Nofra. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Khara". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN IB Padang*. Vol. 3, No. 1, (Maret 2017).
- Ulimen Muhandas. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pununtutan serta Tuntutan Pidana Perkara Pemalsuan Uang Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/ A/JA/12/2011 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Pasca Sarjana*. Vol. 5. No. 1. (2015).
- Wiratama Bramanda. "Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan". *Jurnal GEMA*. THN XXVII/50/ Pebruari - Juli 2015. UNS Surakarta.
- Wayan Santosa. "Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 5. No. 1. (Mei 2016).
- Zulfa Eva Achjani. "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Menghancurkan Pemalsuan dan Problema Penerapannya)". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48. No 2. (2018).

### **Skripsi**

- Febriawita Rizqi, *Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya* (UIN: Surabaya, 2012).
- Hidayatullah Misbah Arif. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB (Studi Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan BPKB di Polresta Yogyakarta Tahun 2014)". (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018).
- Novayanti Debora. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)". (Skripsi-- Universitas Indonesia 2012).

Sari Dewi Kurnia. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)”. (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

### **Wawancara**

Arifaini Agung, Wawancara: Sekertaris Desa, Kalitidu, 29 Mei 2021.

Gufron. *Wawancara*. Kalitidu, 26 Januari 2021.

Huda Ivan Nurul, *Wawancara*, Surabaya, 2 Juni 2021.

Kurniawan Adi, *Wawancara*, Rengel, 30 Mei 2021

Lukman Hakim. *Wawancara*. Kalitidu, 12 Januari 2021.

Mawardi Imam, Kepala Desa, *Wawancara*, Kantor Desa, 29 Mei 2021.

Rahmad Dwi Basuki, Kasi Pelayanan, *Wawancara*, Kantor Desa, 29 Mei 2021.

Suturi, Masyarakat Kalitidu, *Wawancara*, 12 juni 2021

### **Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Praktik: Definisi”.  
<https://kbbi.web.id/praktik.html>. Diakses pada tanggal 18 November 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Duplikasi: Definisi”,  
<https://kbbi.web.id/duplikat.html>. Diakses pada tanggal 18 November 2020.

Wikipedia. “STNK: Definisi”.  
[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat\\_Tanda\\_Nomor\\_Kendaraan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat_Tanda_Nomor_Kendaraan). Diakses pada tanggal 18 November 2020.

Wikipedia. Winardi. “Analisis: Definisi”.  
<https://wikipedia.kemdikbud.com/entri/analisis>. Diakses pada tanggal 18 November 2020.

*Software Digital al-Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya